

Article Type: Research Paper

Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat

Yohana Pranita¹, Idris²

^a Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Corresponding Author : yohanapranita11@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of capital expenditure on economic growth and income inequality in West Sumatra. This research is descriptive and inductive. The data used in this study is secondary data with data collection using panel data obtained from BPS West Sumatra Province 2014-2018 period with 19 regencies / cities in West Sumatra. This study analyzed using a simultaneous equation model (simultaneous equation regression model). The results of this study indicate that (1) Capital Expenditures have a significant effect on Economic Growth in West Sumatra (2) Capital Expenditures have no significant effect on Income Inequality in West Sumatra (3) Simultaneously Capital Expenditures and Economic Growth have a significant effect on Income Inequality in West Sumatra.

Keyword : Capital Expenditure, Economic Growth, Income Inequality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat. Penelitian ini berjenis deskriptif dan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan data panel yang diperoleh dari BPS Provinsi Sumatera Barat periode 2014-2018 dengan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian ini menganalisis menggunakan model persamaan simultan (simultaneous equation regression model). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat (2) Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat (3) secara simultan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat.

Kata-Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

Kode Klasifikasi JEL : P24, F43

AFFILIATION

Jurusan Ilmu
Ekonomi, Fakultas
Ekonomi,
Universitas Negeri
Padang

DOI

-

KUTIPAN:

Pranita,Y & Idris Analisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat 3(1) 79-86

INFO ARTIKEL

Diterima:

23 Januari 2021

Disetujui:

27 Februari 2021

Terbit Daring:

1 Maret 2021

PENDAHULUAN

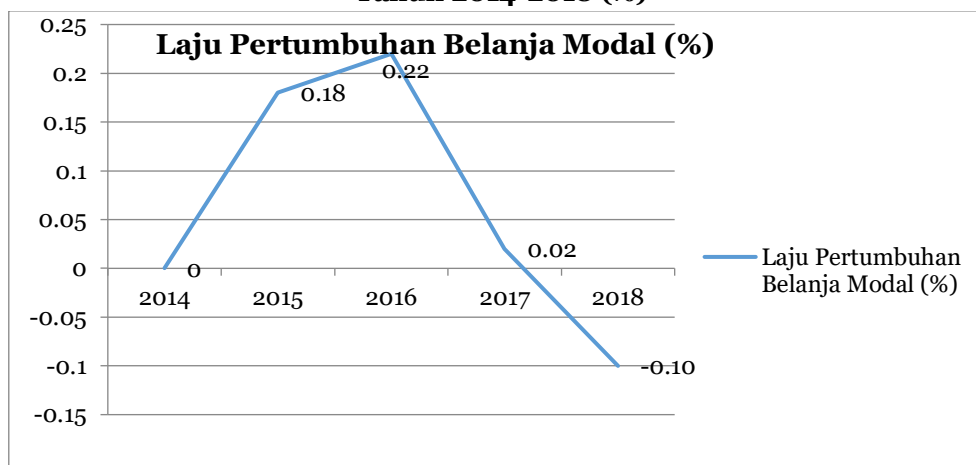
Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi harus diikuti dengan pengurangan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi fenomena penting yang masih terus perlu dikaji dan dianalisis untuk menentukan kebijakan yang dapat diambil dan digunakan oleh pemerintah agar lebih terarah, serta berjalan dengan efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pertumbuhan ekonomi bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Sjafrizal, 2018). Kenaikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan output dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun. Bagi suatu daerah untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang di hasilkan tiap tahunnya (Rizky et al., 2016).

Semakin tinggi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi juga tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan positif. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, ketimpangan pendapatan akan meningkat. Sebaliknya, jika ketimpangan pendapatan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga (Djohan et al., 2016).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai pendapatan rata-rata tinggi dan pembangunan ekonomi yang adil antar daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Target RPJPN dibayangkan pada tahun 2005-2025 hanya mampu mencapai target peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Meskipun ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, tetapi upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah masih perlu diupayakan oleh pemerintah.

Gambar 1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Belanja Modal di Sumatera Barat Tahun 2014-2018 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar (data diolah)

Pada gambar 1. data laju pertumbuhan belanja modal di Sumatera Barat berfluktuasi. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan belanja modal adalah sebesar 0,18 persen. Angka ini naik sebesar 0,04 poin laju pertumbuhan belanja modal 2016 menjadi 0,22 persen. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan belanja modal menurun sebesar 0,20 poin sehingga menjadi 0,02 persen. Hingga tahun 2018 laju pertumbuhan belanja modal sebesar -0,10. Penurunan yang terjadi dikarenakan realisasi belanja modal di Sumatera Barat disebabkan tingginya kebutuhan bidang pendidikan di Sumatera Barat dan tertundanya proyek infrastruktur di Sumatera Barat.

Djohan et al., (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa variabel yaitu variasi pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang sangat kecil dan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh kecil dan negatif dan tidak signifikan

terjadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya variasi dalam pengeluaran pemerintah memiliki efek positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana pengeluaran pemerintah pada penelitian ini dihitung secara total dan hanya meneliti efek dari variasi dalam pengeluaran pemerintah untuk variasi dalam pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan daerah antara provinsi-provinsi di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian selanjutnya hanya akan meneliti pengaruh dari variabel belanja modal menggunakan model persamaan simultan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka penulis ingin melakukan sebuah karya ilmiah dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat”

TINJAUAN LITERATUR

Teori Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro dan Smith (2011) ketimpangan pendapatan adalah distribusi yang tidak proposional dari pendapatan nasional total di antara beberapa rumah tangga dalam negara. Dua ukuran distribusi pendapatan tersebut yaitu distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) dan distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi (*functional of factor share distribution of income*).

Myrdal (1957) mengemukakan adanya dampak kurang menguntungkan untuk menjelaskan fenomena meningkatnya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Ia berpendapat *backwash effect* lebih besar daripada dampak penyebaran. Dampak penyebaran merupakan dampak dari ekspansi di pusat kegiatan ekonomi di daerah relatif tertinggal melalui kenaikan permintaan produk pertanian, bahan baku, serta barang konsumsi yang dihasilkan industri kecil (Kuncoro, M 2013)

Alat untuk menganalisis pendapatan perorangan yaitu kurva Lorenz. Dalam kurva Lorenz terdapat dua sumbu yaitu sumbu horizontal memperlihatkan jumlah penerimaan pendapatan, tidak dalam angka absolut tetapi dalam *persentase kumulatif*. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk (Arsyad, L 2004). Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio (BPS, 2018). Menurut Todaro dan Smith (2011), semakin tinggi nilai koefisien gini semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan, sebaliknya semakin rendah nilai koefisien gini semakin merata pula distribusi pendapatannya. Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketimpangan sempurna).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw, N (2003) pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDB pada satu tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi menurut (Sukirno, 2006).

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi } (\Delta Y) = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_t} \times 100$$

Dimana :

ΔY = Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar perubahan PDB (%)

PDB_t = nilai PDB tahun t

PDB_{t-1} = nilai PDB tahun sebelumnya.

(Deliarnov, 2003) melalui analisis mikro Adam Smith menguraikan masalah pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis serta aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Menurut Todaro dan Smith (2011), setiap perekonomian harus menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, peralatan, dan bahan baku) yang mengalami penyusutan dan kerusakan. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, di perlukan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*).

Belanja Modal

Menurut Todaro dan Smith (2011), akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi jika sebagian tertentu pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk meningkatkan output maka dan di masa yang akan datang. Belanja modal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang terus dicapai oleh suatu daerah selalu bisa memperbaiki infrastruktur daerah. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan dan belanja aset lainnya (Arini S, 2016).

Peran pemerintah dalam kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertumbuhan bahwa suatu daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat daerahnya, sehingga pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, keterkaitannya dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk dari pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* dalam hal ini pemerintah daerah sebagai agen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai prinsipal (Arini S, 2016).

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah dengan menambah aset tetap atau kekayaan pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Tersedianya kebutuhan fasilitas publik membuat masyarakat akan lebih aktif dalam melakukan pekerjaannya serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investor di masing-masing daerah yang dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Putri, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis deskriptif dan induktif. Data yang digunakan yaitu data panel. Data panel adalah gabungan dari data *time series* dan data *cross section* dengan menggunakan sampel 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2014-2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Indirect Least Square* (ILS). Model yang akan digunakan yaitu penerapan model regresi persamaan simultan (*simultaneous equation regression model*) yaitu dengan model sebagai berikut :

$$Y1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + U_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 Y1 + U_2 \dots \dots \dots (2)$$

Setelah persamaan direduksi maka persamaan akan berubah menjadi :

$$Y1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + U_1 \dots \dots \dots (1.1)$$

$$Y2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 \widehat{Y1} + U_2 \dots \dots \dots (2.1)$$

Dalam persamaan diatas terdapat dua variabel depeden dan satu variabel independen yaitu Y_1 adalah Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan variabel ekspektasi (fitted), dan Y_2 yaitu Ketimpangan Pendapatan X_1 Belanja Modal. Selanjutnya α dan β sebagai konstanta dan u yaitu error term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil estimasi dari Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Dengan nilai signifikan 0,0000 dan nilai koefisien -0,535285. Artinya, apabila terjadi penurunan terhadap Belanja Modal maka Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat akan mengalami penurunan sebesar -54% dengan asumsi *ceteris paribu*, begitu sebaliknya jika belanja modal mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan di Sumatera Barat terjadi fenomena pertumbuhan ekonomi eksklusif, pertumbuhan ekonomi eksklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas dan tidak merata, belanja modal sendiri terserap tetapi tidak diikuti oleh naiknya laju pertumbuhan ekonomi namun sebaliknya pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang disebabkan oleh pembangunan yang dikeluarkan dari belanja modal belum efektif atau belum terlaksana dengan baik sehingga terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Muinelo-Gallo & Roca-Sagalés (2013) menunjukkan bahwa PDB merupakan penentu signifikan dari hasil kebijakan fiskal. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Arini S, (2016) dan Rizky et al., (2016) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan penelitian Liu et al., (2019) bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah mengekang belanja layanan publik pada pendidikan, iptek dan distorsi ini mengakibatkan stagnasi modal manusia dan kemajuan teknologi, lama membatasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Meningkatnya belanja modal akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dimana belanja modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil estimasi dari Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat. Dengan nilai signifikan 0,5350 > 0,005. Artinya, setiap terjadinya peningkatan pada Belanja Modal tidak akan berpengaruh penurunan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan belanja modal yang dikeluarkan untuk infrastruktur dan yang lainnya di kabupaten dan kota sumatera barat sedang dalam masa pembangunan dan belum terlihat manfaatnya bagi perekonomian masyarakat, oleh sebab itu belum terlihat pemerataan pendapatan sehingga masih terjadi ketimpangan pendapatan di kabupaten dan kota sumatera barat. Dapat disimpulkan semakin besar belanja modal yang dikeluarkan atau semakin kecil belanja modal yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maka masih terdapat ketimpangan pendapatan karena tidak adanya perbedaan yang berarti pada besar atau kecilnya belanja modal.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Kavya & Shijin, 2020) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan keuangan ditemukan cacat untuk memperbaiki ketimpangan pendapatan yang memburuk. Belanja publik secara apriori memiliki hubungan yang tidak linier dengan ketimpangan pendapatan.

Berbeda dengan penelitian Zhuang et al., (2014), Putri, (2014) dan Nangarumba, (2015) bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Bersama-sama Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil estimasi dari Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat sebesar 47%.

Realisasi belanja modal pemerintah dilaksanakan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur publik perlu dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi ketimpangan pendapatan juga harus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penurunan ketimpangan antar individu, kelompok, masyarakat, dan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah. Disisi lain, dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan ketimpangan pendapatan antar daerah mungkin menurun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Harun et al., (2012) menunjukkan bahwa ekspansi belanja publik secara signifikan meningkatkan distribusi pendapatan diberbagai kelompok rumah tangga. Hasil penelitian Saha & Mishra, (2020) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Zolfaghari et al., (2020) menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur sosial dan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Sjafrizal, (2008) banyak faktor yang menentukan ketimpangan antar daerah, yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah yang berbeda akan menyebabkan ketimpangan yang lebih besar antar daerah. Alokasi investasi pemerintah termasuk belanja modal. Oleh karena itu, perbedaan dalam belanja modal dan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan daerah.

SIMPULAN

Simpulan pada penelitian ini adalah (1) Secara parsial Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat (2) Secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat (3) Secara simultan variabel Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dikemukakan saran sebagai berikut (1) Pemerintah sebaiknya dapat lebih meningkatkan belanja modal karena berkaitan dengan fasilitas publik. Belanja modal perlu dialokasikan lebih efektif dan efisien agar penggunaan sumber dana bukan hanya untuk belanja rutin namun lebih ditekankan pada belanja modal. Sehingga realisasi belanja modal menjadi lebih terarah dan lebih efisien (2) Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan otonomi daerah yang dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang lebih baik

akan mengurangi tingkat pendapatan diharapkan pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat pendapatan suatu daerah bisa lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini S, P. R. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan*. 2(2), 180–198.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan* (ke-4). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djohan, S., Hasid, Z., & Setyadi, D. 2016. *Government Expenditure as Determinants of Economic Growth and Income Inequality of Inter-Province of the Islands in Indonesia*. 7(22), 148–158.
- Harun, M., Mat, S. H. C., & Jalil, A. Z. A. 2012. Public Expenditure Expansion and Inter-ethnic and Rural-urban Income Disparity. *Procedia Economics and Finance*, 1(12), 296–303. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00034-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00034-2)
- Kavya, T. B., & Shijin, S. 2020. Economic development, financial development, and income inequality nexus. *Borsa Istanbul Review*, 20(1), 80–93. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.12.002>
- Kuncoro, M. 2013. *Mengurangi Ketimpangan*. Kompas. <http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2013/03/mengurangi-ketimpangan.html>
- Liu, D., Xu, C., Yu, Y., Rong, K., & Zhang, J. 2019. Economic growth target, distortion of public expenditure and business cycle in China. *China Economic Review*, 101373. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101373>
- Mankiw, N. G. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. 2013. Joint determinants of fiscal policy, income inequality and economic growth. *Economic Modelling*, 30(1), 814–824. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.11.009>
- Nangarumba, M. 2015. *Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014*. 7(2), 9–26.
- Putri, N. putu valentiana shanty. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Pendapatan. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana kota dan 55 kecamatan dengan perbedaan karakteristik dimasing-masing wilayahnya*. ma. 41–49.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 2007.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. 2016. *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia*. 8(1), 9–16.
- Saha, A. K., & Mishra, V. 2020. Genetic distance, economic growth and top income shares: Evidence from OECD countries. *Economic Modelling*, 92(August 2019), 37–47. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.007>
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya Di Indonesia* (1st ed.). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan* (kedua). Jakarta: Kencana.
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. 2011. *Pembangunan Ekonomi* (Kesebelas). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zhuang, J., Kanbur, R., & Rhee, C. 2014. Inequality in Asia and the Pacific: Trends, drivers, and policy implications. In *Inequality in Asia and the Pacific: Trends, Drivers, and Policy Implications*. <http://hdl.handle.net/11540/4723>
- Zolfaghari, M., Kabiri, M., & Saadatmanesh, H. 2020. Impact of socio-economic infrastructure investments on income inequality in Iran. *Journal of Policy Modeling*, 42(5), 1146–1168. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.02.004>
- Arini S, P. R. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan*. 2(2), 180–198.

- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan* (ke-4). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djohan, S., Hasid, Z., & Setyadi, D. 2016. *Government Expenditure as Determinants of Economic Growth and Income Inequality of Inter-Province of the Islands in Indonesia*. 7(22), 148–158.
- Harun, M., Mat, S. H. C., & Jalil, A. Z. A. 2012. Public Expenditure Expansion and Inter-ethnic and Rural-urban Income Disparity. *Procedia Economics and Finance*, 1(12), 296–303. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00034-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00034-2)
- Kavya, T. B., & Shijin, S. 2020. Economic development, financial development, and income inequality nexus. *Borsa Istanbul Review*, 20(1), 80–93. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.12.002>
- Kuncoro, M. 2013. *Mengurangi Ketimpangan*. Kompas. <http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2013/03/mengurangi-ketimpangan.html>
- Liu, D., Xu, C., Yu, Y., Rong, K., & Zhang, J. 2019. Economic growth target, distortion of public expenditure and business cycle in China. *China Economic Review*, 101373. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101373>
- Mankiw, N. G. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. 2013. Joint determinants of fiscal policy, income inequality and economic growth. *Economic Modelling*, 30(1), 814–824. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.11.009>
- Nangarumba, M. 2015. *Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014*. 7(2), 9–26.
- Putri, N. putu valentiana shanty. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Pendapatan, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana kota dan 55 kecamatan dengan perbedaan karakteristik dimasing-masing wilayahnya*. ma. 41–49.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 2007.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. 2016. *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia*. 8(1), 9–16.
- Saha, A. K., & Mishra, V. 2020. Genetic distance, economic growth and top income shares: Evidence from OECD countries. *Economic Modelling*, 92(August 2019), 37–47. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.007>
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya Di Indonesia* (1st ed.). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan* (kedua). Jakarta: Kencana.
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. 2011. *Pembangunan Ekonomi* (Kesebelas). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zhuang, J., Kanbur, R., & Rhee, C. 2014. Inequality in Asia and the Pacific: Trends, drivers, and policy implications. In *Inequality in Asia and the Pacific: Trends, Drivers, and Policy Implications*. <http://hdl.handle.net/11540/4723>
- Zolfaghari, M., Kabiri, M., & Saadatmanesh, H. 2020. Impact of socio-economic infrastructure investments on income inequality in Iran. *Journal of Policy Modeling*, 42(5), 1146–1168. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.02.004>